

## **ABSTRAK**

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Adapun masalah dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian dan perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha indomaret dan alfamart. Tujuan penelitian untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha indomaret dan alfamart, serta untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha indomaret dan alfamart. Tipe dari penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Bentuk-bentuk pengalihan uang koin menjadi uang sumbangan yang kerap dilakukan pengusaha bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela. Hasil dari penelitian ini yaitu pengalihan uang kembalian kedalam bentuk donasi sering dilakukan akan tetapi sesuai persetujuan dari konsumen, pihak pelaku usaha minimarket indomaret dan alfamart dalam menawarkan kepada konsumen mengenai uang kembalian konsumen akan dijadikan donasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu dalam praktik belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku, praktek ini masih sering dilakukan tanpa persetujuan jelas dari konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; Pengalihan Uang Kembalian; Usaha Minimarket.

## **ABSTRACT**

*Business actors and consumers have their respective rights and obligations. The Consumer Protection Law has regulated the protection provided to consumers who are harmed by business actors, including the rights and obligations of consumers or business actors. The purpose of consumer protection law indirectly is to increase the dignity and awareness of consumers. Indirectly, this will also encourage producers to conduct business with full responsibility. The forms of diversion of coins into donations that are often carried out by entrepreneurs can cause deviations from the established legal rules, because this activity will be detrimental if consumers are not willing. According to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection or often referred to as UUPK, this problem must also be seen from the provisions of Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money and Goods or commonly referred to as UUPUPB, as in Article 5 of UUPUPB which explains that every donation is made voluntarily and without coercion is one of the requirements for granting a permit to collect money and goods. The Consumer Protection Act or UUPK was created and approved to protect consumer rights, so that consumers must receive their money back in full and UUPUPB also explains that in giving money it must be based on a sense of volunteerism and there is no coercion.*

*Keywords: Consumer Protection; Transfer of Change; Minimarket Business.*